

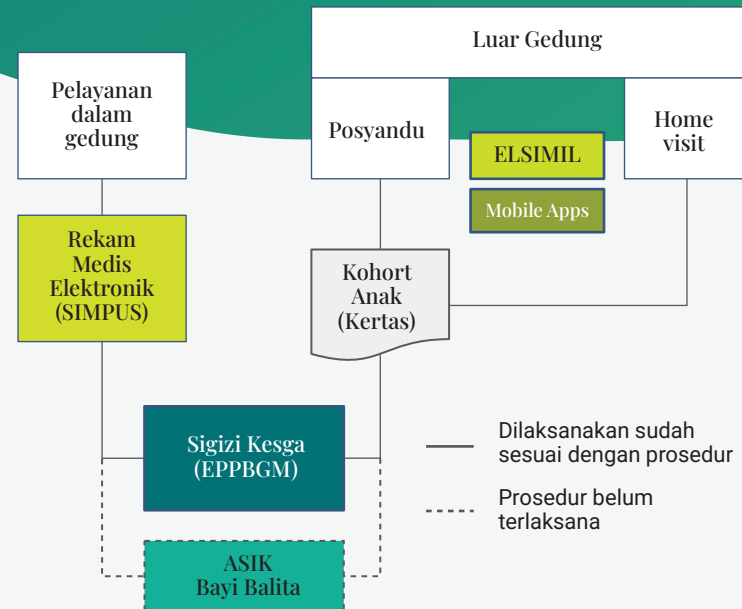
Policy Brief

Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Digital Pelayanan Gizi Bayi Balita

Pernyataan Masalah

Indonesia memiliki berbagai sistem digitalisasi untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan gizi pada bayi balita. Sistem digital kesehatan telah digunakan untuk layanan gizi bayi dan balita, baik di fasilitas kesehatan, komunitas maupun di tingkat individu. Hasil survey dari penelitian optimalisasi ekosistem satu sehat sebagai intervensi kesehatan digital untuk pencegahan stunting tahun 2025 menunjukkan berbagai aplikasi seperti seperti Sigizi Kesga (e-PPGBM), ELSIMIL, SIMPUS, ASIK sudah digunakan oleh Puseksmas maupun kader kesehatan. Namun, berbagai sistem tersebut belum terintegrasi, sehingga menimbulkan beban kerja ganda bagi tenaga kesehatan dan risiko ketidaksesuaian data.

Aplikasi Sigizi Kesga atau EPPGBM merupakan sistem digital dari Kementerian Kesehatan yang paling banyak digunakan oleh Puskesmas dan Kader Kesehatan untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan gizi pada bayi balita. Akan tetapi, selain Sigizi Kesga, Puskesmas yang mendapatkan kunjungan bayi balita pada layanan dalam gedung juga harus melakukan pencatatan melalui SIMPUS. Di sisi lain, terdapat pula



Gambar 1. Gambaran alur pencatatan dan pelaporan pelayanan gizi pada bayi dan balita yang terfragmentasi baik secara konvensional maupun digital.

Puskesmas yang masih menggunakan e-Kohort untuk pencatatan dan pelayanan gizi pada bayi balita. Temuan penelitian kami juga mendapatkan bahwa Kader Kesehatan juga menggunakan aplikasi khusus untuk monitoring Stunting dari BKKBN seperti ELSIMIL. Hasil survey juga menunjukkan Puskesmas sudah terbiasa menggunakan teknologi digital sementara kader kesehatan lebih banyak melakukan pencatatan secara konvensional menggunakan berbagai formulir kertas

**61
Staf
Puskesmas**

61 (100%)
Pengguna aplikasi
kesehatan

59 ASIK

18 EPPGBM

12 E-Kohort

**60
Kader**

33 (55%)
Pengguna aplikasi
kesehatan

12 ASIK

14 EPPGBM

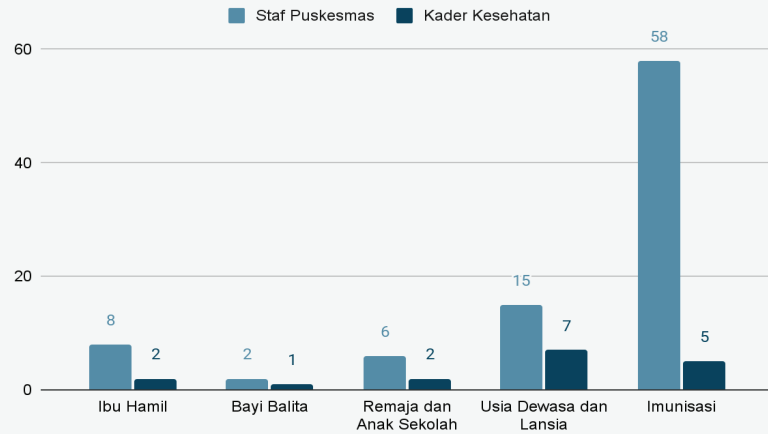
4 E-Kohort

40 lainnya

27 (45%)
Pencatatan Manual

Gambar 2. Jumlah Staf Puskesmas dan Kader Menggunakan Aplikasi

Sementara itu, dari berbagai aplikasi tersebut, ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) belum digunakan untuk pelayanan gizi dan balita. ASIK disediakan untuk mengintegrasikan pencatatan dan pemantauan layanan kesehatan masyarakat di luar gedung bagi tenaga kesehatan di layanan primer. Dalam Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Primer (ILP) juga telah mengatur bahwa ASIK menjadi aplikasi yang perlu digunakan untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan di luar gedung seperti Posyandu, dan Kunjungan



Gambar 3. Jumlah Staf Puskesmas dan Kader Kesehatan yang Menggunakan ASIK Berdasarkan Menu

Rumah. Akan tetapi, hasil penelitian kami menemukan bahwa ASIK masih terbatas untuk pelayanan Imunisasi dan penyakit tidak menular (PTM) (lihat gambar 2).

Sigizi Kesga masih menjadi aplikasi utama, sedangkan upaya simplifikasi aplikasi melalui ASIK terhambat oleh adanya program prioritas lain. Kondisi ini membuat ASIK untuk pelayanan luar gedung gizi bayi balita belum banyak dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan dan kader. Di sisi lain, upaya untuk memiliki data kesehatan yang terintegrasi belum dapat terlaksana.

Faktor yang mempengaruhi penggunaan ASIK

Simplifikasi sistem digital untuk pelayanan gizi pada bayi balita melalui ASIK belum terjadi karena tenaga kesehatan dan kader belum memanfaatkan. Hasil penelitian optimalisasi ekosistem satu sehat sebagai intervensi kesehatan digital untuk pencegahan stunting tahun 2025 menemukan minimnya penggunaan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Minimnya pengetahuan tentang ASIK Bayi Balita untuk pelayanan gizi**

ASIK Bayi Balita belum banyak digunakan seperti menu Imunisasi dan PTM dipengaruhi oleh terbatasnya sosialisasi ke staf Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan dan kader. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat tenaga kesehatan di Puskesmas yang tidak mengetahui ada menu bayi balita untuk pelayanan gizi dalam ASIK. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga masih terbatas melakukan sosialisasi ASIK Bayi Balita pada daerah tertentu, belum seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

2

Belum adanya integrasi data antara Sigizi Kesga dan ASIK Menu Bayi Balita

Penggunaan ASIK Bayi Balita terbatas digunakan karena belum adanya integrasi data dengan aplikasi atau sistem digitalisasi pelayanan kesehatan lainnya. Sistem yang belum terintegrasi membuat beban tambahan untuk tenaga kesehatan dalam proses pencatatan dan pelaporan pada lebih dari satu aplikasi dengan tujuan yang sama.

3

Sistem ASIK belum stabil untuk melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan gizi bayi balita

Belum banyaknya penggunaan ASIK Bayi Balita untuk pelayanan gizi dipengaruhi pula oleh kondisi sistem yang belum stabil. Pengalaman tenaga kesehatan yang menggunakan ASIK untuk Imunisasi dan PTM menemukan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan sering kali membuat adanya kesenjangan jumlah data yang dicatat dengan data yang terlapor dalam dashboard. Terdapat delay untuk proses pelaporan dari data tercatat.

4

Tata kelola ASIK belum dapat mendukung pemanfaatan dan integrasi

Berdasarkan hasil penelitian optimalisasi ekosistem satu sehat sebagai intervensi kesehatan digital untuk pencegahan stunting tahun 2025, menemukan bahwa sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Kesehatan mengalami keterbatasan untuk mengelola ASIK. SDM yang seharusnya bertanggung jawab terhadap ASIK tersebut mengalami pengalihfungsian ke program prioritas lainnya sehingga mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan aplikasi. Di sisi lain, pelaksanaan ASIK juga belum memiliki peta jalan untuk pengembangannya.

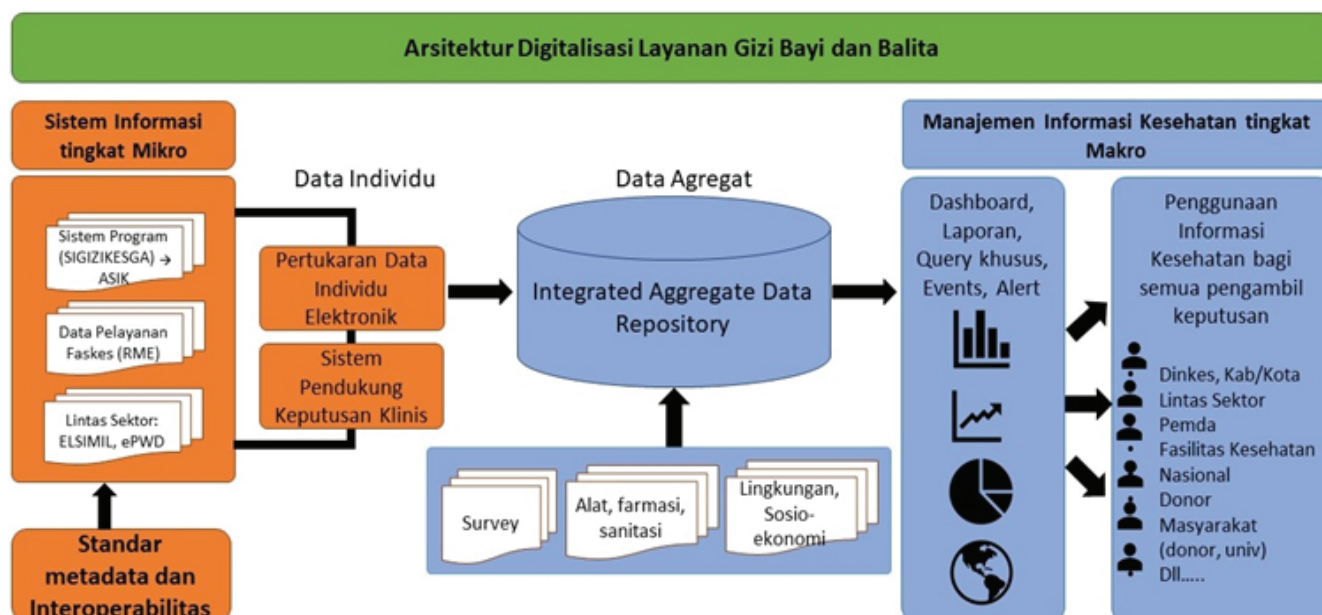


Rekomendasi Kebijakan Digitalisasi Layanan Gizi Bayi & Balita

Digitalisasi pelayanan gizi bayi dan balita di Indonesia perlu diperkuat pada aspek perilaku pengguna, organisasi dan teknologi, berikut ini rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan:

No.	Aspek	Detail Rekomendasi	Pemangku Kebijakan
1	Human: Perilaku pengguna	Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dan kader dalam menggunakan teknologi digital	1. Direktorat Yankesga, Kementerian Kesehatan 2. Dinas Kesehatan 3. Puskesmas
		Penguatan kemampuan tenaga kesehatan dan kader untuk memahami dan memanfaatkan data gizi dalam upaya promotif dan preventif	1. Direktorat Yankesga, Kementerian Kesehatan 2. Dinas Kesehatan 3. Puskesmas
		Penguatan kapasitas kader untuk pendampingan, supervisi, diseminasi informasi kesehatan (gizi)	1. Dinas Kesehatan 2. Puskesmas
			1. Direktorat Yankesga, Kementerian Kesehatan 2. Biro hukum, Kementerian

2	<i>Organization:</i> Manajemen & organisasi	Penguatan regulasi penggunaan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan sampai tingkat kader	1. Direktorat Yankesga, Kementerian Kesehatan 2. Biro hukum, Kementerian Kesehatan
		Penyusunan regulasi pemanfaatan data dan informasi terkait gizi lintas sektor	1. Direktorat Yankesga, Kementerian Kesehatan 2. Biro hukum, Kementerian Kesehatan 3. Dinas Kesehatan
		Penetapan tata kelola kesinambungan (sustainability) implementasi digitalisasi layanan kesehatan (gizi)	1. Direktorat Yankesga, Kementerian Kesehatan 2. TTDK Kementerian Kesehatan
3	<i>Technology:</i> Teknologi & manajemen data	Simplifikasi aplikasi secara bertahap (RME dan ASIK), disertai migrasi data dan integrasi dalam SATUSEHAT untuk mendukung interoperabilitas layanan	1. TTDK Kementerian Kesehatan
		Penyempurnaan dashboard yang ada dengan penguatan fungsi analitik dan pengembangan sistem notifikasi dini untuk mendukung evaluasi dan respons cepat di tingkat makro–mikro	1. TTDK Kementerian Kesehatan 2. Direktorat Yankesga, Kementerian Kesehatan
		Integrasi data gizi antara sistem digital kesehatan untuk mendukung monitoring dan evaluasi tatalaksana stunting lintas sektor	1. TTDK Kementerian Kesehatan 2. Direktorat Yankesga, Kementerian Kesehatan 3. Dinas Kesehatan 4. K/L terkait



Gambar 4. Usulan skema integrasi dan interoperabilitas digitalisasi untuk pelayanan gizi pada bayi dan balita, yang mengkombinasikan data individu, agregasi dan integrasi dengan sumber data lain, serta kemampuan analitik untuk menghasilkan informasi yang diperlukan berbagai pemangku kepentingan.